

# **PERLINDUNGAN HUKUM TEKNISI GIGI DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

Abdul Malik Yudianto  
E1A014061

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum teknisi gigi dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum, sinkronisasi hukum dan penemuan hukum *in concreto*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dianalisis dengan normatif kualitatif dan *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perlindungan hukum teknisi gigi dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menunjukkan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan yang lebih rendah derajatnya telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah. Bentuk perlindungan hukum teknisi gigi dalam struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain: jaminan pengaturan perlindungan hukum, jaminan pengaturan melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, jaminan pengaturan mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pemberi pekerjaan, jaminan pengaturan imbalan jasa profesi, jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, jaminan pengaturan tentang perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama, jaminan pengaturan pengembangan profesi, jaminan pengaturan untuk menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan kewenangan, standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Teknisi Gigi, Pelayanan Kesehatan,

**PROTECTION OF DENTAL TECHNICIANS IN HEALTHCARE  
SERVICES IN THE STRUCTURE OF INDONESIAN  
LEGISLATION**

By:  
ABDUL MALIK YUDIANTO

E1A014061

**ABSTRACT**

*The research aims to determine the synchronization of legal protection arrangements and legal protection forms of dental technicians in healthcare services in the Indonesian regulatory structure. The method of study used is normative juridical method with the Statute approach, analytical approach, conceptual approach, and other methods. The specifications of the research used are legal inventory, legal synchronisation and legal discovery in Concreto. The type of data used is secondary data obtained from libraries and analyzed with qualitative normative and content analysis. Based on the results of the research, it can be concluded that the dental technician's legal protection arrangement in health services on Indonesia's regulatory structure has shown a synchronisation status. That is, that the lower rule of interest has been in accordance with the higher rules of its interest and the higher rule of interest is the basis of lower regulatory formation. The legal protection form of dental technicians in the structure of legislation in Indonesia, among others: the guarantee of legal protection arrangements, the assurance of arrangements to do the work in accordance with professional standards and standards of operational procedures, guarantee the arrangement of obtaining information that is complete and honest from the employer, guarantee the arrangement of professional services rewards, guarantees protection against the work risk relating , moral, morality, and religious values, assurance of professional development arrangements, warranties of arrangement to reject the wishes of the recipient of health care that contradicts the authority, professional standards, Code of conduct, standards of service, standards of operational procedures, or provisions of legislation, and warranties of other rights regulation in accordance with the provisions of the laws and regulations.*

*Keywords : Legal protection, dental technicians, healthcare services,*